

## Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang

Rohana Tiara<sup>1</sup>, Mardianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

E-mail: [rohana.tiara08@yahoo.co.id](mailto:rohana.tiara08@yahoo.co.id)

**ABSTRAK:** Masalah kemiskinan di negara ini tampaknya menjadi hal utopis yang harus diselesaikan. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan, yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat pada kategori miskin. Pemerintah Kota Palembang, melalui bakti sosial, memiliki program Bantuan Makanan Non Tunai (BPNT) di kota Palembang, yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan. Jika BPNT menjadi salah satu program unggulan yang seharusnya bisa mengurangi kemiskinan setiap tahun karena target program ini keluarga kurang mampu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan campuran (*mixed method*), melalui dokumentasi teknis, observasi, dan wawancara, serta penyebaran kuesioner, yang melibatkan 99 responden sebagai sampel dalam mengukur efektivitas program BPNT di kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan teori Duncan yang dikutip Steers, menunjukkan bahwa Program BPNT di Kota Palembang yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, diketahui tingkat efektivitas 34,75% yang dapat diartikan bahwa program BPNT telah berjalan cukup efektif.

**Kata kunci:** Keefektifan, Program, Bantuan Makanan Non-Tunai

**ABSTRACT:** *The problem of poverty in this country seems to be a utopian thing to be solved. Efforts continued to be done by the government through programs of poverty alleviation, which is expected to empower the people on the Government of Palembang city, through social service, has a named Assistance Food Non Cash (BPNT) in Palembang city, which is one of the flagship program of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia in terms of poverty alleviation. Therefore BPNT one of the flagship program that should have been able to reduce poverty every year with program targets that are those from disadvantaged families. Research is using the descriptive mixed approach (mixed method), through technical documentation, observation, and interviews, as well as the spread of the questionnaire, which involves 99 respondents as samples in measuring the effectiveness of the BPNT program in the Palembang city. The Result of this research indicates that the BPNT Program in Palembang City using Duncan theory cited Steers, Which is achievement of goals, integration and adaptation, known that effectiveness level is 34.75% which can be interpreted that the BPNT program has been running quite effectively.*

**Keywords :** Effectiveness, Program, Non-Cash Food Assistance

### PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola persediaan pangan yang mencukupi, dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masalah ini seakan tidak pernah berhenti dan terus berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari tingkat

pendapatan yang rendah, namun juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, "Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat." Dalam rangka penanggulangan kemiskinan inilah, pemerintah merealisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat beragam, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program-program ini belum sepenuhnya berhasil, namun telah menunjukkan sedikit perubahan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2015 yang mencapai 10.619.860 jiwa atau 8,22 persen mengalami penurunan pada September 2016 yaitu mencapai 10.485.640 jiwa atau 7,73 persen. Data ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah mengalami perubahan, namun belum signifikan.

Berbagai program dan upaya pengentasan kemiskinan yang telah terlaksana di Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menyediakan persediaan pangan untuk masyarakat kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program penting dalam upaya mereformasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjelaskan bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran penerima manfaat, memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran, dipandang perlu melaksanakan program pembaharuan Rastra. Berdasarkan hal tersebut, Presiden memberikan arahan

reformasi Program Rastra menjadi bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai atau disebut juga dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Gotong Royong Bantuan Pangan Non Tunai (E-warung BPNT) atau pedagang bahan pangan lain yang telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Program BPNT sendiri merupakan reformasi Program Subsidi Rastra, dengan perubahan dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan). (Pedoman Umum BPNT, 2016)

Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam proses penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp 110.000,- yang diberikan setiap bulan. KKS yang dimodifikasi menjadi kartu debit kombo multifungsi dengan sistem *e-wallet*, serta kartu *Automated Teller Machine* (ATM) tabunganku yang terintegrasi. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warung. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan. (Pedoman Umum BPNT, 2016)

KPM BPNT adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Program BPNT disalurkan melalui sistem perbankan yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Penggunaan sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program serta memberikan kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. (Pedoman Umum BPNT, Tahun 2016)

Berkaitan dengan pelaksanaan Program BPNT telah terlaksana di Kota Palembang. Program BPNT terlaksana di 16 kecamatan di Kota Palembang dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dinas Sosial Kota Palembang, Camat, dan Lurah yang bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/Pendamping merupakan pihak yang ikut terlibat dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM di Kota Palembang. Berikut data jumlah KPM yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Palembang.

**Tabel 1.2. Penerima BPNT Kota Palembang Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah KPM	Penyaluran
1	Alang-Alang Lebar	485	370
2	Bukit Kecil	500	371
3	Gandus	538	377
4	Iilir Barat I	845	586
5	Iilir Barat II	1.003	678
6	Iilir Timur I	413	295
7	Iilir Timur II	903	551
8	Kalidoni	581	381
9	Kemuning	540	376
10	Kertapati	1.711	1.059
11	Plaju	1.249	959
12	Sako	420	303
13	Seberang Ulu I	1.444	982
14	Seberang Ulu II	1.072	750
15	Sematang Borang	375	288
16	Sukarami	1.010	749

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang pada Surat Kanwil BRI Palembang No. B.195/KW-IV/DJS

Tabel 1.2. diketahui bahwa penyaluran Kartu Kombo/KKS (alat pembayaran elektronik BPNT) berjalan dengan lambat, hal ini dapat dilihat dari jumlah KPM di 16 Kecamatan di Kota Palembang yang penyaluran Kartu Kombo tidak dapat mencapai 100% dalam setiap gelombang. Lambatnya penyaluran Kartu Kombo ini membuat pencairan bantuan pangan juga ikut terhambat untuk sampai ke tangan KPM. Penyaluran yang lambat

disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah karena dokumen yang dimiliki masyarakat tidak lengkap.

Program BPNT di Kota Palembang mengalami beberapa permasalahan, yaitu sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini terlihat pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran sosialisasi, yaitu masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui nama program yang mereka terima, masyarakat juga tidak paham ruang lingkup seputar bantuan pangan ini. Penyaluran kartu kombo/KKS ke KPM berjalan dengan lambat sehingga penyaluran bantuan ikut terhambat.

Transfer dana bantuan pangan juga dilakukan dalam kurun waktu yang tidak menentu. Pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Pemerintah Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dijelaskan bahwa dana bantuan ditransfer setiap satu bulan sekali, namun kondisi yang penulis temukan di lapangan adalah dana bantuan ditransfer lebih lama, yaitu 2 bulan sekali (dengan jumlah dana tidak di akumulasi). Permasalahan lainnya adalah banyak Kartu Kombo milik masyarakat yang error, sehingga pada saat akan membeli bantuan di agen e-warung akun saldonya tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan pangan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas Program BPNT yang telah berjalan, oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut efektivitas Program BPNT di Kota Palembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 'efek' dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan lain kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L.Gibson dkk. (1996:38) mengatakan bahwa, "Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas." Selanjutnya Tjokroamidjojo (1987:3) mengatakan bahwa, "Efektivitas agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya

hasil.”

Sedangkan menurut Keban (2004:140) mengatakan bahwa, “Suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.” Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan. Menurut Georgopolous dan Tannebaum (1985:50) mengemukakan bahwa, “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.” Selanjutnya menurut Steers (1985:87) mengemukakan bahwa, “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.” Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik*, “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa, “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”

## B. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan yang dikutip Steers (1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan  
“Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.” (Duncan dalam Steers, 1985:53)
2. Integrasi  
“Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.”
3. Adaptasi  
“Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur : sarana prasarana dan pendampingan.”

Menurut Subagyo (2006 :35) “Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.” Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard M.Steers, “Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.” Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) seperti tabel berikut :

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 - 59,99	Tidak efektif
60 – 79,99	Cukup efektif
Di atas 80	Sangat efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiano 2009

Berdasarkan tabel 2.1 efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat dilihat dari dimensi pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi. Menghitung efektivitas program menggunakan statistic

sederhana (Sugiyono dalam Budiani, 2009), yaitu:

$$\text{Efektivitas program} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dimana : R = Realisasi kegiatan

T = Target kegiatan

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

## METODE PENELITIAN

### Penelitian

Dalam artikel ini peneliti menggunakan metode campuran (*Mixed Method*), yaitu analisis ini bisa dilakukan berdasarkan pendekatan kuantitatif (analisis angka-angka secara deskriptif dan inferensial) dan kualitatif (deskripsi dan analisis teks atau gambar secara tematik), atau antara dua pendekatan ini. *Mixed Method* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

### Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam artikel ini berupa hasil wawancara dan pengamatan pada Dinas Sosial Kota Palembang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Sekretariat PKH, agen e-warong serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi, yakni berupa surat-surat, instruksi presiden, peraturan daerah, koran, artikel, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan efektivitas Program BPNT di Kota Palembang.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan, studi dokumentasi, dan observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini, yaitu seluruh masyarakat penerima Program BPNT di Kota Palembang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan bila peneliti tidak memungkinkan meneliti keseluruhan populasi dan karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu (Sugiyono, 2013: 91), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Dalam artikel ini, penentuan jumlah sampel dari populasi menggunakan rumus dari Taro Yamane, yaitu sebagai berikut:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan

Sehingga, diketahui bahwa total populasi seluruh KPM sebesar N = 13.089 KPM dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar (d<sup>2</sup>) = 10%, maka jumlah sampel yang diperoleh sebesar:

$$= \frac{13089}{.d^2} + 1 = \frac{13089}{.1} + 1 = (13089).(0,1^2) = \frac{13089}{9} + 1 = 131.8 = 99,24 = 99$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencapaian Tujuan Program BPNT

Pencapaian adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian - bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Dalam mencapai tujuan Program BPNT ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan diawasi, yaitu pentahapan program, kurun waktu, serta sasaran program yang kongkrit.

### **Pentahapan Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Pentahapan program merupakan mekanisme yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program. Beberapa mekanisme pelaksanaan Program BPNT, yaitu tahap persiapan e-warong, tahap pendaftaran peserta, dan tahap pemanfaatan bantuan. Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, maka pembahasan secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pentahapan program yang pertama adalah persiapan e-warong. Persiapan e-warong merupakan proses awal pelaksanaan Program BPNT. E-warong sendiri adalah istilah yang digunakan dalam Program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Jenis e-warong dapat berupa pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Penetapan e-warong dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang diperlukan sebagai penyalur BPNT. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi e-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Tim Korkot PKH Kota Palembang, dimana beliau menyatakan bahwa:

"Agen harus mengerti cara menggunakan mesin pembaca kartu kombo karena dalam pencairan bantuan yang diutamakan itu adalah bagaimana saldo dalam Kartu Kombo bisa dicairkan untuk membeli bahan pangan di e-warong, kalau dari agen e-warong saja tidak bisa menggunakan mesin pembaca kartu bisa kacau urusannya. Makanya sebelum agen warung kerja sama dengan

Bank Penyalur nanti dilatih dulu cara menggunakan mesin itu. Agen e-warong juga harus paham cara melayani KPM dengan baik, juga harus punya jaringan dengan banyak distributor, jadi kalau stok barang habis di satu distributor bisa cari ke tempat lain, yang penting stok barang harus selalu ada."

Hal ini menunjukkan bahwa persiapan e-warong BPNT di Kota Palembang sudah cukup memuaskan, dikatakan cukup memuaskan karena persentase yang paling tinggi lebih dari 50% responden memilih bahwa e-warong BPNT sudah cukup baik dari segi pelayanannya. Kemudian penulis membandingkan hasil kuesioner dari *key informant* dengan hasil wawancara dari beberapa informan. Pernyataan informan mengenai persiapan e-warong BPNT telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa persiapan e-warong BPNT cukup memuaskan.

Pentahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran peserta. Pada tahap ini terdapat beberapa proses yang harus dijalani oleh masyarakat, adapun proses pendaftaran peserta Program BPNT sebagaimana yang diungkapkan oleh Tim Korkot PKH Kota Palembang bahwa: "Pendaftaran BPNT dilakukan di kantor kelurahan dengan membawa surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi yang nantinya akan di sesuaikan dengan data dari pusat. Hasil penyesuaian data ini kalau sudah cocok dengan data pusat berarti sudah berhasil terdaftar, tapi kalau tidak sesuai ya berarti pendaftarannya gagal. Kalau yang seperti ini bisa jadi karena ada kesalahan minor, misalnya kesalahan pada penulisan identitas maka akan diperbaiki dulu oleh petugas kelurahan. Beda lagi kalau data atau dokumen yang dimiliki masyarakat benar-benar tidak sesuai atau bahkan tidak punya, ini harus diselesaikan dulu masalahnya dan harus dilengkapi syarat yang kurang."

### **Kurun Waktu Penyaluran Dana Bantuan**

Dalam pelaksanaan suatu program, masalah ketepatan waktu pengiriman dana atau anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Demikian halnya dengan Program BPNT yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh

beberapa aspek, salah satunya adalah masalah kurun waktu pentransferan dana bantuan pangan. Dana BPNT ditransfer oleh Bank Penyalur dengan membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.

Dalam pelaksanaan Program BPNT ditemukan permasalahan mengenai dana bantuan yang diterima oleh KPM. Pada aturan yang telah ditetapkan, kurun waktu pentransferan dana adalah 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah dana sebesar Rp. 110.000,-/KPM, namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, yaitu TKSK BPNT diketahui bahwa transferan dana bantuan pangan sering terlambat. Sebagaimana ungkapan salah satu TKSK berikut ini:

"Penyaluran BPNT ini dilakukan setiap satu bulan sekali, tapi memang pelaksanaannya masih sering tidak tepat waktu. Keterlambatan ini karena memang dana dari pusat belum masuk ke Bank Penyalur."

#### **Sasaran Program BPNT**

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program BPNT ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini.

Sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah yang bisa mendapatkan bantuan pangan ini hanya yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tim Korkot PKH Kota Palembang mengenai persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan bantuan pangan ini, antara lain:

"Kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah (1) keluarga yang pendapatannya rendah, (2) tidak punya

penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan, (3) memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (4) rumah dengan kondisi yang tidak layak huni."

#### **Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan pengembangan konsensus. Dalam artikel ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan Program BPNT dalam usaha mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu di Kota Palembang. Sebagaimana yang kita ketahui sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu program khususnya pada daerah yang minim perkembangan media dan informasi yang memadai sebagai sarana sosialisasi.

#### **1. Sosialisasi**

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu program. Demikian halnya dengan Program BPNT pada Dinas Sosial Kota Palembang yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksana program dengan masyarakat sebagai sasaran utama dari Program BPNT menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan Program BPNT ini.

Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan. Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, Program BPNT akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut. Dengan begitu masyarakat akan semakin

terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Terkait proses sosialisasi Program BPNT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang, setelah peneliti melakukan penelusuran lewat hasil wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

"Hal ini menjadi permasalahan dari program BPNT ini, kami sebagai pelaksana ini sudah melakukan sosialisasi akan tetapi dalam setahun itu cuma sekali, itupun dilakukan ketika masyarakat mau mendaftar menjadi peserta. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan biaya untuk melakukannya. Jadi, yang kami harapkan bahwa masyarakat bisa lebih aktif dalam mencari informasi."

## 2. Pengembangan Konsensus

Pengembangan konsensus merupakan kesepakatan, persetujuan ataupun kecocokan. Dalam pelaksanaannya Program BPNT memerlukan konsensus dari beberapa pihak yang bersangkutan. Pada Program BPNT ini juga yang termasuk ke dalam pengembangan konsensus adalah persetujuan antara Dinas Sosial dibantu TKSK dengan agen e-warong serta kesepakatan agen e-warong dengan KPM. Konsensus ini dilakukan dengan tujuan Program BPNT dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahpahaman. Pada tahap awal pelaksanaan Program BPNT, TKSK dengan agen e-warong akan mendiskusikan kesepakatan mengenai jumlah dan jenis bahan pangan yang akan diterima oleh KPM. Berdasarkan pendapat TKSK mengenai pengembangan konsensus BPNT diketahui bahwa:

"Kesepakatan dengan agen cuma mengenai berapa jumlah pangan yang dapat dibeli KPM dan apa saja jenisnya. Masalah harga juga harus sesuai dengan yang di jual di pasaran dan kualitasnya juga harus bagus."

### Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam adaptasi Program BPNT, yaitu sarana Program BPNT dan proses pendampingan.

## 1. Sarana Program BPNT

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana berupa fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk kelangsungan Program BPNT adalah KKS/Kartu Kombo, mesin pembaca kartu kombo yang berupa *EDC/Smartphone/Mobile Pos Device/Tablet/NFC Reader/Biometric Reader*. Penggunaan mesin pembaca kartu kombo dapat dipilih agen e-warong, sehingga agen e-warong dapat beradaptasi sesuai dengan kemampuannya menggunakan mesin pembaca kartu.

Adaptasi ini sangat berguna demi memudahkan agen e-warong menyesuaikan diri dengan alat yang mudah digunakannya, namun pada umumnya agen e-warong menggunakan mesin EDC. Mesin EDC ini digunakan karena agen telah diajarkan oleh TKSK pada saat memulai kerjasama dengan Bank Penyalur. Hal ini serupa dengan pernyataan TKSK yang berpendapat bahwa: "Penggunaan mesin pembaca Kartu Kombo di e-warong sebagai tempat penyaluran BPNT ini bisa menggunakan EDC bisa juga menggunakan HP smartphone, nanti agen e-warong akan memilih sendiri mau menggunakan yang mana."

Sarana BPNT lainnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang disebut juga dengan Kartu Kombo. Kartu kombo merupakan alat pembayaran elektronik BPNT dengan instrument pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.

## 2. Pendampingan Program BPNT

Dalam konteks Program BPNT mungkin akan ada banyak permasalahan yang akan dihadapi di lapangan oleh para penerima BPNT sehingga perlu dilakukan kegiatan pendampingan terhadap KPM BPNT tersebut. Pendampingan dilakukan agar upaya pendampingan BPNT terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendampingan dengan penerima BPNT dalam rangka menjembatani kebutuhan penerima BPNT dalam menjalankan usahanya. Pendamping BPNT disebut juga dengan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Proses pendampingan bagi KPM menjadi salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan program ini untuk mencapai keefektifan dalam pelaksanaannya dan mampu mengarahkan masyarakat seputar bantuan pangan ini. Pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten merupakan salah satu kebutuhan mendasar KPM. Dengan adanya pendampingan, KPM dapat terbantu dalam mendapatkan akses informasi tentang Program BPNT, prosedur pendaftaran, penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan hingga kendala yang dihadapi seputar BPNT ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif. Dikatakan belum efektif karena telah membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dan hambatan. Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya Program BPNT. Dalam pelaksanaan BPNT masih banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti proses pendampingan yang masih dirasa kurang oleh KPM, kartu kombo error yang berakibat hilangnya saldo KPM, jumlah e-warong BPNT yang tidak banyak serta belum merata ke seluruh kelurahan, serta tidak memenuhi tahapan kegiatan pendampingan yang telah diatur di dalam program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan tentang Program BPNT di Kota Palembang, yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran yang lebih untuk mengadakan sosialisasi, bukan hanya melakukan sosialisasi satu kali selama satu tahun.

Sosialisasi sangat berguna bagi masyarakat, agar penerima bantuan memahami lebih dalam mengenai Program BPNT dan tidak hanya menerima saja.

2. Penting rasanya agar dibuat tim pendamping yang lebih banyak untuk setiap kecamatan, karena satu pendamping sulit mengawasi KPM dalam satu kecamatan yang jumlahnya sangat banyak. Proses pendampingan juga harus dilakukan secara intens serta mampu memberikan arahan dan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan.

3. Perlu ada pengawasan serta evaluasi dalam proses pelaksanaan Program BPNT di tahun-tahun berikutnya dan serius dalam pengawalannya dalam artian segala hal yang dinilai tidak efektif perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan, sosialisasi, sarana, dan kurun waktu dana bantuan, serta kartu kombo yang error yang berakibat hilangnya saldo KPM. Evaluasi ini dilakukan agar kedepannya proses pelaksanaan Program BPNT bisa berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- P.Siagian, Sondang. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. PPM. Jakarta.
- Erlangga Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode*

*Penelitian dalam Teori dan Praktek.*  
Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi Metode R&D.* CV Alfabeta. Bandung.

**Sumber lain :**

Peraturan Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang

Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya



DeJoS

Demography Journal of Sriwijaya